

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya serap anggaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Sistem informasi keuangan daerah yang dijalankan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta sudah baik, sehingga dapat menghasilkan daya serap anggaran yang optimal. Sistem informasi keuangan daerah akan memudahkan para pengguna informasi untuk mengetahui seberapa besar anggaran yang sudah terealisasi, anggaran mana saja yang tidak dijalankan, serta anggaran mana saja yang telah disetorkan ke kas daerah sehingga daya serap anggaran dapat diketahui dengan cepat.
2. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya serap anggaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi daya serap anggaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta karena tahap perencanaan dan pelaksanaan anggaran merupakan kunci dari pencapaian kinerja suatu organisasi.

3. Sistem informasi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya serap anggaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Dalam mencapai daya serap anggaran yang optimal maka secara bersama-sama sistem informasi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan baik. Sistem informasi keuangan daerah dapat membantu pengelolaan keuangan daerah dan mempercepat proses-proses yang ada di dalamnya. Penggunaan sistem informasi keuangan daerah dapat mengurangi penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang mungkin terjadi sehingga mempengaruhi daya serap anggaran.

B. Implikasi

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat implikasi penelitian yang timbul diantaranya adalah:

1. Sistem informasi keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap daya serap anggaran. Tanpa adanya sistem maka tidak akan diketahui dengan cepat dan jelas seberapa besar daya serap anggaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta harus menempatkan sumber daya manusia yang tepat dan kompeten di bidangnya untuk menjalankan sistem informasi keuangan daerah guna mendukung kepentingan keuangan daerah sehingga informasi daya serap anggaran dapat diketahui dengan cepat dan akurat.

2. Pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap daya serap anggaran. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta harus mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga daya serap anggaran dapat tercapai secara optimal. Jika pengelolaan keuangan daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dapat dikelola dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel maka tujuan organisasi dapat tercapai sehingga menghasilkan daya serap anggaran yang tinggi.

C. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, agar dapat memperbaiki kekurangan ataupun keterbatasan yang ada pada penelitian ini, yaitu:

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya tidak hanya dilakukan pada satu instansi tetapi dilakukan pada instansi lain di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataupun di Pemerintah Daerah lainnya juga Pemerintah Pusat.
2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya menambah jumlah responden sebagai sampel penelitian sehingga hasil penelitian dapat lebih baik.
3. Diharapkan peneliti selanjutnya menambahkan variabel lainnya, seperti kompetensi sumber daya manusia, pengadaan barang jasa, gaya kepemimpinan dan pelayanan prima yang belum ada atau tidak digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat memperkaya hasil penelitian.

4. Diharapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta merencanakan kebutuhan pegawai yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang pekerjaannya.
5. Diharapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga daya serap anggaran dapat tercapai dengan optimal.